

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas yang paling penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Setiap detik di dunia maupun di Indonesia pembayaran terjadi, melibatkan jutaan transaksi ekonomi yang beraneka ragam, seperti transaksi jual beli barang dan jasa, pembelian maupun pelunasan kredit, juga melibatkan miliaran bahkan triliunan rupiah dengan alat pembayaran kartal maupun giral. Dalam konteks perekonomian, pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Berbicara tentang pembayaran maka kita berbicara pula tentang sistem pembayaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia pasal 1 (ayat 6) dikatakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sementara itu menurut *Bank for International Settlement (BIS)* (2011), sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan dan sistem transfer dana antarbank yang menjamin sirkulasi uang.

Secara konsep dasar proses pembayaran memang mudah dan sederhana, tetapi semakin kompleks transaksi pembayaran maka semakin rumit pula sistem

pembayaran yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perekonomian dunia yang menyebabkan semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, kebutuhan pelaku ekonomi akan sistem pembayaran yang lebih aman, cepat dan lancar pun meningkat. Sistem pembayaran pun dituntut untuk dapat menghindari risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko operasional dan risiko sistemik karena kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian. Infrastruktur pembayaran yang dirancang dengan baik dapat memberikan kontribusi untuk berfungsinya pasar dan membantu untuk menghilangkan friksi dalam perdagangan (*European Central Bank, 2010*).

Menurut Bank Indonesia dalam Pengantar Sistem pembayaran (2014), peran sistem pembayaran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendukung efektivitas operasi moneter. Stabilitas sistem keuangan pun akan menimbulkan lembaga yang sehat, pasar keuangan yang efisien dan sistem pembayaran yang handal. Dari sisi perekonomian makro, meningkatnya perkembangan sistem pembayaran akan berpengaruh pada upaya peningkatan kestabilan sistem keuangan yang memiliki struktur kuat dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. Kemudian dalam sisi perekonomian mikro, perkembangan sistem pembayaran tentu saja memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pengguna, seperti dunia usaha, masyarakat, dan dunia perbankan dalam mendukung kegiatan ekonominya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia Bab III disebutkan bahwa tujuan dan tugas Bank Indonesia adalah Pasal 7 “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. Pasal 8 “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi Bank”.

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia dinyatakan secara tegas, bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, disamping dua tugas pokok lainnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan mengawasi bank.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain

lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pendedaran uang, kelancaran sistem pembayaran disamakan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.

Menurut sifatnya, sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik atau biasa disebut *e-money*.

Di Indonesia, instrumen non-tunai yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat (Kertas), seperti cek, bilyet giro, nota debit, dan nota kredit, atau alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sedangkan untuk sistem transfer tersedia sistem BI-RTGS dan sistem Kliring Nasional.

Menurut nilai pembayarannya, sistem pembayaran dibagi pula menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran nilai besar (*high value*) dan sistem pembayaran nilai ritel (*retail value*). Sistem pembayaran nilai besar adalah transfer kredit untuk nominal besar dan bersifat segera, sedangkan sistem

pembayaran ritel adalah transaksi dengan nilai kecil namun dengan volume yang tinggi dan tidak bersifat segera. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada mekanisme pembayaran. Sistem pembayaran nilai besar menggunakan mekanisme pembayaran Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sedangkan untuk sistem pembayaran ritel menggunakan mekanisme pembayaran Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Sistem kliring adalah salah satu mekanisme pembayaran non tunai yang sudah sangat lama digunakan di wilayah Indonesia. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara peserta kliring baik atas nama nasabah peserta maupun atas nama peserta yang penyelesaiannya diselesaikan pada waktu tertentu. Adapun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem kliring yang dikelola Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Dari pertama kali dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 1967 hingga saat ini tahun 2016, sistem kliring di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dari yang berawal dari Sistem Kliring manual (1908 - 1990), Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (1990 - 1994), Sistem semi otomasi (1994 - 1998), Sistem Kliring elektronik (1998 - 2005), hingga Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (2005 - Sekarang).

Dari data mengenai arus peputaran kliring di SKNBI yang terdapat di *web* Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir (2006 - 2015) (dapat dilihat di Lampiran 1) dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan minat masyarakat (nasabah) akan

sistem pembayaran SKNBI ini, setiap tahun dari 2006 hingga 2015 rata-rata mengalami peningkatan volume transaksi sebesar 6,3 juta. Dari sisi peserta SKNBI yaitu bank-bank, juga dinilai mengalami peningkatan minat. Menurut data dari web Bank Indonesia, saat ini pada tahun 2017 bank peserta SKNBI sudah berjumlah 145, yang terdiri dari berbagai macam bank pemerintah, bank asing, bank pemerintah daerah, bank syariah maupun unit usaha syariah. Hal tersebut merupakan prestasi bagi Bank Indonesia dan Bank Indonesia dianggap sudah berhasil mengimplementasikan sistem kliring yang bersifat nasional karena pada awalnya bank peserta SKNBI pada tahun 2005 hanya berjumlah 10 peserta yang terdiri dari 8 bank di wilayah Jakarta dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia .

Meningkatnya penggunaan SKNBI oleh masyarakat maupun dari bank sendiri selama 10 tahun terakhir ini dan juga perkembangan sistem kliring di Indonesia yang bersifat progresif membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor-faktor yang ditentukan penulis terhadap penerimaan (*acceptance*) bank terhadap SKNBI. Hal ini penting karena hasil penelitian ini dapat memberikan petunjuk bagi Bank Indonesia sebagai pihak penyelenggara SKNBI agar dapat menjaga konsistensi dan keunggulan kompetitif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik melakukan penelitian mengenai SKNBI dengan judul **Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Bank Terhadap Sistem Kliring Bank Indonesia (Pada Bank Peserta SKNBI di Wilayah Kota Pangkalpinang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah konstruk - konstruk dalam penelitian ini yaitu, *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Acceptance* (penerimaan) bank terhadap SKNBI, *System Quality*, *Information Quality* dan *Trust* saling berhubungan dan bagaimana sifatnya?
2. Konstruk mana yang paling dominan berpengaruh terhadap *Acceptance* (penerimaan) bank terhadap SKNBI?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas ruang lingkungannya, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini meneliti bagaimana hubungan dan sifat antara konstruk - konstruk dalam penelitian ini yaitu, *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Acceptance* (penerimaan) bank terhadap SKNBI, *System Quality*, *Information Quality* dan *Trust*.
2. Wilayah penelitian hanya sebatas daerah Kota Pangkalpinang saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan dan sifatnya antara konstruk - konstruk dalam penelitian ini yaitu, *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease*

of Use, Acceptance (penerimaan) bank terhadap SKNBI, *System Quality, Information Quality* dan *Trust*.

2. Untuk mengetahui konstruk mana yang dominan berpengaruh terhadap *Acceptance* (penerimaan) bank terhadap SKNBI.

1.5 Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, nantinya penelitian ini akan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Indonesia diharapkan dapat dijadikan bahan masukan agar dapat meningkatkan minat nasabah.
2. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat menambah informasi dan perbendaharaan kepustakaan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung.
3. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan, dan pengalaman dalam serta referensi bagi rekan mahasiswa maupun peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan di dalam penelitian ini dipaparkan menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori untuk mendukung penelitian yang terkait dengan topik penelitian dan digunakan dalam pengembangan berbagai hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan identifikasi penelitian, populasi dan sampel, variabel dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis serta uraian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya serta memberikan implikasi penelitian yang dilakukan.